

ABSTRACT



Diah Ayu Herawati, NIM 55208110020, PROCESS OF PLANNING AND DEVELOPMENT PROGRAM E-GOVERNMENT (Case Study Providing public information through in website www.jakarta.go.id by the Department of Communications, Information and Public Relation Province Government of DKI Jakarta in Year 2011)

keywords: Strategy, Provision of Public Information, Management Government web site

Article 13 of the law is clear that to achieve prompt, precise, and simple, each public body shall appoint officers and managers of information and documentation to create and develop a system providing information services in a fast, easy, and reasonable in accordance with the technical guidance of public information service standards that apply nationally.

There should be public information management efforts are more balanced. Not too forward purely technical aspects to the exclusion of quality information. Therefore, the quality of information that should be the spirit of the information conveyed to the public. Moreover, the form of public information service by the government / public institutions is associated with it.

Jakarta Capital City Government already has a website, but how to design and develop the web as a medium for the provision of government public information? This study aimed to know, understand and explain the planning and provision of information to the public conducted by the Public Relations Jakarta Jakarta Provincial Government.

Theoretical framework that be used by this research are Government Communications, Public Relations in Government Institutions, Planning and Development of Public Relation Process, Cyber PR, E-Government, Website Management and Public Information. Type of this research is descriptive qualitative by using methods of Case Study

The results showed that the Department of Communication, Informatics and Public Relations of Jakarta Capital City Government has entered the stage of planning and preparation for the third time since 1995, which became the background remains the Freedom of Information Law 14 of 2008, only in 2011 was the fulfillment of thing will find information public, website development, public information categorizing, IT maintenance and update of public information.

ABSTRAKSI



Diah Ayu Herawati NIM 55208110020, **PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM E-GOVERNMENT** (Studi Kasus Penyediaan Informasi Publik melalui website www.jakarta.go.id oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011)

kata kunci: Strategi, Penyediaan Informasi Publik, Pengelolaan web site pemerintah

Pasal 13 UU KIP menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik harus menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Harus ada upaya pengelolaan informasi publik yang lebih berimbang. Tidak terlalu mengedepankan aspek teknis belaka sehingga mengabaikan kualitas informasi. Sebab, kualitas informasi itu seharusnya menjadi ruh dari informasi yang disampaikan kepada publik. Apalagi bentuk layanan informasi publik oleh pemerintah/lembaga publik sangat berkaitan dengan hal tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai web Pemerintah, namun bagaimana merancang dan menyusun web pemerintah ini sebagai media penyediaan informasi publik? Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan dan penyusunan penyediaan informasi untuk publik Jakarta yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Komunikasi Pemerintahan, Humas dalam Lembaga Pemerintah, Proses Perencanaan dan Penyusunan Humas, Cyber PR, E-Government, Pengelolaan Website dan Informasi Publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedang metode penelitian yang digunakan Studi Kasus.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta sudah memasuki tahapan perencanaan dan penyusunan yang ketiga kalinya semenjak tahun 1995, yang menjadi latar belakang tetapkan UU KIP No.14 tahun 2008, hanya saja pada tahun 2011 hal yang ditonjolkan adalah pemenuhan informasi publik, pengembangan website, mengkategorikan informasi publik, pemeliharaan IT dan mengupdate informasi publik.